**Kendala, Pengetahuan pajak, Faktor Yang Mempengaruhi
Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak PPN dan PPh Warung Makan
(Studi Di Desa Jarakan)**

TIM PENYUSUN :

1. ANGGA FEBRIANTO	(1960301100030)
2. RULIN YUNESTRI	(1960301100003)
3. SHAFIRAH NURLITA.CH	(1960301100002)

DOSEN PENGAMPU :

R.Gesah.M.P.S.E.AK.M.M

FAKULTAS EKONOMI PRODI AKUNTANSI

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

ABSTRACT

This study aims to determine the constraints, non-compliance factors in taxpayers of food stalls in Jarakan village, Tulungagung district. The method used in this research is observation, direct interviews of the person concerned has a business by collecting data comparisons.

The results of this research discussion were obtained from interview surveys based on existing cases. However, in this implementation process there were several obstacles, including the taxpayer refusing to be interviewed, the shop owner taxpayer did not respond when the interview team asked questions. how much the community in Jarakan village is against non-compliance in paying the food stall business tax.

Keywords: Constraints, factors that affect non-compliance with culinary stalls, food

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala, factor factor ketidakpatuhan dalam pembayar pajak warung makan di desa jarakan, kabupaten tulungagung . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi , wawancara langsung dari pada yang bersangkutan mempunyai usaha dengan cara mengumpulkan pebandingan data.

Hasil pembahasan peneletian ini di peroleh dari pada survey wawancara berdasarkan pada kasus yang ada. Walaupun demikian dalam proses pelaksanaan ini terdapat beberapa hambatan, diantaranya Wajib Pajak menolak untuk dilakukan wawancara, Wajib Pajak pemilik warung tidak memberikan respon ketika Tim wawancara bertanya tanya . seberapa besar masyarakat desa jarakan terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak usaha warung makan.

Kata Kunci : Kendala, Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak patuh pada usaha warung kuliner, makanan

Pendahuluan

Kepatuhan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada prinsipnya adalah tindakan WP (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajiban membayar PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat WP patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan WP yang berpredikat pembayar PPN dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal PPN yang disetor yang dibayarkan pada kas negara. Dengan demikian, pembayar PPN terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai WP patuh, karena meskipun WP memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran PPN maka tidak dapat diberi predikat WP patuh.

Menurut Rustiyaningsih (2011), menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain pemahaman terhadap *self-assessment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi WP terhadap sanksi perpajakan. Menurut Subiyantoro (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi WP patuh membayar pajak studi kasus pada pedagang Pasar Pramuka Jakarta Timur. Subiyantoro mengukur motivasi dengan dua faktor yaitu pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan citra administrasi.

Ketidakpatuhan akan timbul apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai, sehingga WP secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, tidak menyampaikan SPT, dan lain-lain) atau melakukan kewajiban perpajakan tetapi tidak sepenuhnya benar (membayar dan melaporkan pajak tidak tepat waktu). WP yang mempunyai persepsi bahwa peraturan masih mempunyai banyak celah untuk melakukan kecurangan akan membuat WP bertindak tidak patuh dan sebaliknya jika WP merasa peraturan perpajakan sangat ketat sehingga membuat sikap patuh. WP yang berusaha patuh juga akan terpengaruh oleh kualitas pelayanan kantor pelayanan pajak, kebanyakan masyarakat tidak mau berurusan dengan birokrasi, peraturan yang ribet atau pelayanan yang lambat. Tingkat kepatuhan WP juga ditentukan oleh jenis usaha WP. Misalnya WP orang pribadi

dengan kegiatan usaha (*self-employed*) seperti usaha dagang, cenderung tidak patuh untuk mendaftar diri jika sudah melebihi omzet, sedangkan wajib WP badan lebih cenderung lebih patuh dibanding dengan orang pribadi.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara di samping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu (R. Gesah Mukti Prabowo, 2016).

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian di kembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar maupun tidak (R. Gesah Mukti Prabowo, 2016).

Metode Penelitian

❖ Metode pengumpulan data :

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Penelitian secara observasi

Penelitian yang dilakukan dengan jalan pengamatan langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak – pihak terkait.

2. Penelitian kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mencari referensi yang berupa buku-buku, majalah, surat kabar, serta buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

❖ Nama Narasumber pemilik Usaha :

1. Ibu warti (warung nasi pecel, campur)
2. Ibu valen (RM Padang)

3. Ibu samsiah (soto, bakso, mie ayam)
4. Ibu Nanik (Depot Rawon Maryam)

❖ Tempat Penelitian :

1. Di Desa Jarakan tulungagung, Tempat kuliner warung makan yang ada .

Landasan Teori

❖ **Pengertian Pajak**

Menurut (Rachma wati, susan, 2018) Wajib pajak di defisinisikan pada undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sector pajak.

❖ **Pengertian pajak PPN**

Pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan . hal ini disebutkan karena pajak penjualan tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan , antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut waluyo (2011:9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

❖ **Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui.(Effendy & Toly, 2013). Pentingnya aspek pengetahuan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap system perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kantor pajak yang melakukan penyuluhan pajak secara intensif dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepentingan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional pemerintah (hidayutullah, 2015).

❖ **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kamus umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau suatu aturan (2018) . kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk , dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya . wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajibanserta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh.

❖ **Factor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak**

a. Factor ekonomi

1. Penghasilan sebelum pajak : wajib pajak diasumsikan sebagai individu yang rasional dan memperoleh penghasilan yang jumlahnya tetap sehingga WP tersebut akan memilih berapa jumlah penghasilan yang akan di laporkan pada kantor pajak.
2. Tarif pajak : pada kondisi tingkat penghasilan rendah tarif pajak akan mendorong WP untuk melaporkan penghasilanya kepada administrasi pajak. Apabila WP penghasilan cenderung tinggi tidak usah lapor.
3. Besarnya denda (penalty) : denda akan dikenakan apabila penghasilan yang dilaporkan oleh WP terdeteksi oleh admin perpajakan.

b. Factor non ekonomi

1. Factor kesadaran perpajakan

Kesadaran dan pengetahuan ini perlu dipahami oleh WP. Kesadaran dan kesungguhan membayar pajak salah satu aspek bagian kesadaran berwarga negara, apabila kesadaran tinggi maka nilai moralitas perpajakan tinggi.

2. Factor lingkungan WP berada : lingkungan terdiri dari keluarga,teman,jaringan social ,nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang WP.

3. Factor sikap petugas pajak : dimana yang seharusnya petugas menegakan aturan, petugas pajak diharapkan membantu, mudah di hubungkan dan bekerja jujur.

❖ **Kendala pemilik usaha :**

1. Daftar menu kurang menarik
2. Layanan ke konsumen buruk
3. Label identitas usaha kurang jelas
4. Masalah finansial
5. SDM kurang

❖ **Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam sektor pembangunan. beberapa fungsi pajak yakni:

1. Fungsi Anggaran , pajak merupakan sumber pemasukan negara dengan cara mungumpulkan dana dari wajib pajak ke kas negara. Demikian pajak memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
2. Fungsi Mengatur, pajak merupakan alat untuk melaksanakan, mengatur kebijakan negara. Fungsi dari pada mengatur disini ialah , pajak dapat menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan mendorong eksopr atau import, pajak memberi perlindungan negara.
3. Fungsi Stabilisasi ,pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

❖ **System Pungutan Pajak**

System pungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitungnya besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis system pungutan pajak.

1. Selft assesment system (system penilaian diri) membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayar oleh WP yang bersangkutan.
2. Official assesment system , membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada aparat perpajakan.
3. Withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/ fiskus.

❖ **Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan Pajak terdiri dari :

1. Menurut golongan:

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Petambahan Nilai (PPN).

2. Pajak Menurut Sifat atas perbedaan:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

4. Pajak menurut pemungut dan pengelolanya yaitu:

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan dalam hal membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan dalam hal membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.

❖ **Jenis-Jenis SPT**

Surat pemberitahuan atau yang biasa dikenal dengan istilah SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak penghasilan, harta, objek pajak atau kewajiban lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Didalam SPT memuat informasi tentang jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang dilakukan dalam periode Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 1–4.

R. Gesah Mukti Prabowo. (2016). *Mekanisme PPN dan PPnBM*.

Rachma wati, susan, 2018. (2018). Pengertian pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, fungsi dan syarat pemungutan pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

tertentu. Informasi yang dituliskan dalam SPT haruslah benar, lengkap dan jelas. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggung jawaban pada wajib pajak.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, SPT terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. SPT Masa

Jenis SPT Masa ini digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu (bulanan). Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan berdasarkan SPT Masa yaitu :

- Pph pasal 21

- Pph pasal 22
- Pph pasal 25
- Pph pasal 26
- Pph pasal 24 ayat 2
- Pph pasal 15
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak atas penjualan Barang Mewah (PPNBM)
- Pemungut PPN

Pada SPT Masa setiap formulir pajaknya memiliki perbedaan . Perbedaan format SPT Masa terkait dengan tarif dan pajak objek berbeda untuk masing-masing jenis pajak. Selain itu batas waktu pelaporan serta jenis SPT Masa juga berbeda. Untuk SPT Masa PPh wajib pajak harus melaporkan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sedangkan untuk SPT Masa PPn harus melaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya.

2. SPT Tahunan

Bagi wajib pajak dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) diwajibkan untuk melaporkan SPT setiap akhir tahun pajak. Pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) harus dilaporkan baik oleh orang pribadi maupun Badan atau Perusahaan dengan batas pelaporan SPT yaitu tanggal 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan atau perusahaan.

Bagi seseorang yang memiliki suatu usaha ataupun perusahaan, maka tidak hanya membayarkan kewajiban pajaknya, akan tetapi juga melaporkan SPT tahunan PPh Badan

❖ **Jenis –jenis Formulir SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi**

Biasanya jika kita akan membayar pajak, ada surat pemberitahuan tahunan (SPT) yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak. Beberapa SPT pajak yakni

1. Formulir 17770 SS , formulir yang paling sederhana karena hanya 1 lembar . formulir ini digunakan oleh WP yang mempunyai penghasilan selain usaha/ pekerjaan bebas.
2. Formulir 1770 S, formulir yang lampirannya harus di isi. Formulir ini diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi.

3. Formulir 1770, untuk orang pribadi memperoleh penghasilan dari usaha sendiri, dari pekerjaan bebas.

❖ **Pemeriksaan pajak**

1. Pengertian pemeriksaan pajak

Berdasar Pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti dan dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Tujuan pemeriksaan

Pemeriksaan Pajak menurut Peraturan Menteri keuangan No. 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, memiliki dua tujuan, yaitu

- Menguji kepatuhan wajib pajak (perorangan maupun badan) dalam rangka memberikan kepastian dan penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilaporkan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut (Pasal 4 PMK No. 184/PMK.03/2015):
 - a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP
 - b. Terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP
 - c. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - d. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
 - e. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi

- f. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- g. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
- h. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko atau Wajib Pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan harus dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

- Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut (Pasal 70 PMK No. 184/PMK.03/2015):

- i. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- j. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- k. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
- l. pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- m. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- n. pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
- o. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- p. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- q. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- r. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- s. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/ atau
- t. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

3. Kriteria dan Jenis-jenis pemeriksaan Pajak

Kriteria pajak bisa dilakukan dengan 2 cara:

- Pemeriksaan rutin
- Pemeriksaan khusus

Mengacu keperaturan menteri keuangan nomor 17 / pmk. 03/2013, maka kriteria pemeriksaan rutin diatur di pasal 4 yang terdiri:

- a. pemeriksaan SPTLB dengan permohonan (mengacu ke pasal 17B. UU KUP)
- b. pemeriksaan SPT LB tetapi tidak ada permohonan (mengacu ke pasal 17(1) UU KUP)
- c. pemeriksaan atas wajib pajak yang telah diberikan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- d. pemeriksaan SPT yang menyatakan rugi
- e. pemeriksaan karena wajib pajak melakukan pengabungan pelepasan pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan indonesia untuk selamanya
- f. pemeriksaan karena wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.

Menurut peraturan menteri keuangan nomor **17/pmk.03/2013**.

Jenis pemeriksaan pajak :

- Pemeriksaan kantor
- Pemeriksaan lapangan

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Baik pemeriksaan lapangan maupun kantor dilakukan paling lama 2 bulan, dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada WP, Jangka Waktu Pemeriksaann terbagi menjadi dua, antara lain:

- Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Lapangan paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak.
- Pemeriksaan Kantor Pemeriksaaan Kantor paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaaan Kantor sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pembahasan

Usaha kecil menengah (UKM) di negara berkembang seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masakah ekonomi dan sosial dalam negeri, seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan. Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah –masalah tersebut.

Membangun atau merintis mengembangkan usaha kuliner makanan bisa menjadi pilihan primadona sebagian orang. Alasannya adalah makanan dan minuman sudah menjadi kebutuhan yang paling di cari setiap orang (primer).

Namun daalam pembuatan atau menjalankanya tidak sedikit pemilik usaha memiliki kendala ataupun masalah , contohnya :

1. Tidak melakukan survey pasar dulu
2. Minim budgeting
3. Kurangnya strategi

Di dalam mendirikan usaha seorang pemilik usaha juga harus tahu tentang perpajakan,serta besarnya pajak atas penghasilan dari usahanya . Karena setiap penghasilan yang di dapat juga mempengaruhi pembayaran pajak, semakin tinggi penghasilan semakin besar pajak yang di bayarkan .

Hal ini sesuai dengan pendapat James dan Nobes (1997:7) yang “ no tax system can function effectively without the cooperation of the great majority of taxpayer, so the factors which affect compliance are importance “ menyatakan bahwa tidak satupun sistem perpajakan dapat berfungsi dengan efektif tanpa peran serta wajib pajak, karena itu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sangatlah penting. Untuk itu kepatuhan pajak adalah kunci dari keseluruhan sistem perpajakan dan dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi akan mendorong tingkat penerimaan pajak yang tinggi pula. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara (Jhames & Nobes, 1997 : 7). Apabila kesadaran masyarakat ata perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga menjadi peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. “ Petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran tentang tanggung jawab membayar pajak. Selain itu masyarakat juga harus membantu pemerintah untuk berperan serta mengawasi pajak alurnya kemana.

Dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional menuju kemandirian Bangsa, Pemerintah telah membudayakan ketertiban pembayaran pajak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi lebih sadar akan pajak.

Pembahasan disini yakni membahas tentang pajak, kendala, pengetahuan dan ketidak patuhan membayar pajak uaha kecil menengah (UKM)pada usaha warung makan kuliner Di desa jarakan tulungagung.

❖ **Hasil pembahasan**

Kami sebagai penulis sekaligus peneliti beberapa tempat warung makan kuliner di desa jarakan, Tulungagung sudah mewawancarai beberapa pemilik usaha tersebut.

Hasilnya beberapa pemilik usaha tersebut saat kami wawancarai ada beberapa kendala antara lain :

1. Enggan memberikan informasi
2. Menolak untuk di interogasi atau tanya jawab

Tetapi kami tim peneliti tidak patah semangat untuk mencari target yang bersedia memberikan informasi, dari 9 warung makan yang terdapat di Desa Jarakan, kami berhasil mendapatkan 4 narasumber yang bersedia kami wawancarai. 4 orang tersebut adalah :

- a. Ibu warti dimana beliau seorang pengusaha mikro makanan nasi pecel tidak memungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik warung kepada pembeli. Alasan Beliau tidak menerapkan pungutan PPn pada usahanya dikarenakan tergolong warung kecil-kecilan dan bertempat di desa, jika beliau menerapkan PPn pada usaha warung makannya maka akan berdampak tidak ada pembeli lagi. Selain itu ibu Wartti juga belum pernah melaporkan besarnya pajak penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak, karena beliau belum mengerti tentang tata cara pembayaran pajak.
- b. Ibu valen selaku pemilik rumah makan padang yang memberlakukan pemungutan pajak PPh 21, dimana pengunjung yang makan disana akan dikenakan pajak . tarif berlaku bagi golongan siapa saja.

Contohnya : PNS Gol IV bagi yang punya NPWP dan tidak punya NPWP

Rumus pajak bisnis restoran atau warung kuliner = **Dasar pengenaan pajak (DPP)**
× Tarif pajak.

Di tempat ibu valen dasar pengenaan pajak (nominal pembayaran yang diterima atau di pungut sesuai struk) sebesar Rp. 60.000

Tarif pajak sebesar 14% ada (NPWP)

DPP × Tarif pajak

$$60.000 \times 14 \% = 8.400$$

Tarif pajak sebesar 17% tidak ada NPWP

DPP × Tarif pajak

$$60.000 \times 17 \% = 10.200$$

c. ibu samsiah juga selaku pemilik usaha tidak memberlakukan pemungutan pajak, karena beliau tidak tahu ,serta kurang paham akan perpajakan dan masih tergolong warung kecil bukan ukuran orang besar.

d. Ibu Nanik pemilik depot RAWON MARYAM sudah menyelesaikan kewajiban pelaporan pajak penghasilan(PPh) dari usahanya serta menerapkan PPn (pajak pertambahan nilai) pada usaha warung makannya sebesar 10 % dari pembelian konsumen. Kesadaran beliau atas kewajiban pelaporan pajak didasari atas kesadaran pribadi serta kesadaran moril sebagai bentuk partisipasi untuk menunjang kemajuan pembangunan daerah khususnya serta pembangunan Nasional pada umumnya.

Dari hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang pajak perlu dimiliki oleh wajib pajak agar dapat mengetahui hak, dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai wajib pajak, sehingga tujuan pajak, fungsi serta manfaat pajak dapat dipahami, dengan demikian akan timbul kesadaran untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada studi kasus **Kendala, Pengetahuan pajak, Faktor Yang Mempengaruhi Ketidak Patuhan Pembayaran Pajak Warung Makan** di Desa Jarkan di pengaruhi oleh beberapa hal yaitu kurangnya pengetahuan akan perpajakan, kurangnya kesadaran moral untuk membayar pajak serta tingkat SDM yang masih rendah oleh sebagian pengusaha warung makan di desa jarakan.

Nama pengusaha	Pajak	Wajib pajak	NPWP	Non NPWP
Ibu warti	PPn	Non PNS masyarak biasa	0 %	-

Ibu valen	PPn	PNS Gol IV	14 %	17 %
		PNS Gol 1 & II	2 %	3%
		Non PNS	0 %	-
Ibu samsiah	PPn	Non PNS	0 %	-
Ibu nanik	PPn	Semua masyarakat	10 %	-

Table 1. data pemilik warung makan ds. Jarakan yang berhasil diwawancarai

Kesimpulan

Kesadaran Wajib Pajak, serta pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak . Ketidak patuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kurangnya pengetahuan akan pajak, serta tingkat sumber daya manusia. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga menjadi peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. “ Petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran tentang tanggung jawab membayar pajak.

Untuk meningkatkan pengetahuan pajak bagi wajib pajak mengenai hal manfaat pajak dalam pengeluaran umum pembangunan Nasional Petugas Direktorat Jendral Pajak (DJP) seharusnya melakukan pemeriksaan rutin serta memberikan penyuluhan mengenai pentingnya akan kesadaran perpajakan serta manfaat pajak bagi kemajuan pembangunan Nasional. Dengan adanya penerimaan Pajak segala bentuk sarana prasarana umum dapat di bangun dengan segala kemanfaatannya bagi masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan Kepatuhan wajib pajak diharapkan petugas pajak dapat

membuat sanksi secara tegas, adil atau tidak memihak, serta berkekuatan hukum yang tetap sesuai UU Perpajakan yang berlaku.

Pelayanan petugas pajak serta pemberian informasi yang jelas sesuai dengan peraturan yang ada juga sangat mempengaruhi kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak, dengan bersikap sopan serta tidak memandang status sosial dari wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 1–4.
- R. Gesah Mukti Prabowo. (2016). *Mekanisme PPN dan PPnBM*.
- Rachma wati, susan, 2018. (2018). Pengertian pajak,jenis-jenis pajak,sistem pemungutan pajak,fungsi dan syarat pemungutan pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rachma wati, susan, 2018. (2018). Pengertian pajak,jenis-jenis pajak,sistem pemungutan pajak,fungsi dan syarat pemungutan pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Subiyantoro. (2006). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Patuh Membayar Pajak Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pramuka Jakarta Timur. Tesis. Universitas Indonesia.
- Rustiyaningsih, Sri. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
- Universitas Katolik Widya MandalaMadiun. portal.widyamandala.ac.id/jurnal/index.php/warta/article/.../73/76.
- Effendy, T.S. & Toly, A.A (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. *Tax & Accounting Review*, 1(1),1-4.
- Hidayatulloh,H.A (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada KPP Pratam Bandung Cidades). *Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Empat, (2018) , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- James & Nobes, 1997. *The Economics of Taxation, printciple, policy and practice*, Europe: Prentice Hall .